

## Matriks Capaian RAN OGI B12 LKPP 2023-2024

| No. | Ukuran Keberhasilan  | Renaksi   | Progres/Capaian B12  |
|-----|--|---|--|
|     |  | B12 (2023)  |  |
| 1   | Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog   | Mempublikasikan komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan   | <p>1) Telah dilakukan pengembangan sistem untuk menampilkan informasi terkait produk tayang dan transaksi pada Katalaog Elektronik. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk Dashboard Monev Produk dan Transaksi melalui link redash-e-katalog.lkpp.go.id. Pada dashboard ini disediakan filter informasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan instansi atau masyarakat. Filter yang dapat digunakan antara lain terkait periode transaksi atau tahun anggaran, pilihan jenis Katalog Elektronik dan pengelolanya serta satuan kerja/ instansi yang melakukan transaksi E-purchasing. Informasi pada dashboard ini dapat diakses secara publik (view only). Bagi user yang memiliki akses login ke Dashboard Monev Produk dan Transaksi dapat mengunduh detail transaksi yang tersedia di dashboard.</p> <p>2) Telah tersedia dokumen panduan Petunjuk Penggunaan Dashboard Monev Produk dan Transaksi.</p> <p>3) Dashboard Produk dan Transaksi sudah disosialisasikan oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan pada acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa 2023 yang dihadiri oleh K/L/Pemda, perwakilan penyedia maupun asosiasi.</p> |
| 2   | Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat   | Penyesuaian informasi pengadaan barang/jasa darurat yang akan ditambahkan pada LPSE   | <p>1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi pengadaan barang/jasa darurat</p> <p>2) Saat ini, sedang dilakukan revisi Peraturan Lembaga 13 tahun 2013</p> <p>3) Telah dilakukan uji publik dalam rangka penyusunan inventarisasi masalah Perlem PBJ darurat dengan melibatkan organisasi masyarakat (ICW)</p>  |
| 3   | Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat   | Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-pengaduan   | <p>1) Telah dilakukan kegiatan <i>testing/pilot project</i> pengembangan e-Pengaduan dengan melibatkan 120 Inspektorat, termasuk Inspektorat binaan ICW.</p>   |
| 4   | Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka  | Persiapan integrasi data SIKAP dengan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM   | <p>1) Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara LKPP dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>  |
| 5   | Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP | <p>1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan.</p> <p>2. Persiapan pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan</p>                                | <p>Renaksi 1:</p> <p>1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE</p> <p>Renaksi 2:</p> <p>1) Telah dilakukan diskusi di internal LKPP terkait kebutuhan pengembangan kode unik dikembangkan di SPSE. Saat ini di aplikasi SIRUP telah terdapat data dan informasi terkait kebutuhan pengadaan melalui RUP</p> <p>2) Telah dilakukan publikasi informasi melalui siaran pers dan berita pada website LKPP</p>   |
| 6   | Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa   | <p>1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah</p> | <p>Renaksi 1:</p> <p>1) Telah terdapat MoU antara LKPP dengan ICW terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa</p> <p>Renaksi 2:</p> <p>1) Pusat SDM PBJ telah menyelenggarakan program pelatihan PBJ dalam rangka penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 4 batch yang diikuti oleh para pelaku usaha. Program pelatihan bagi pelaku usaha dapat diakses melalui Portal PPSDM.</p> <p>2) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha.</p> <p>3) Direktorat Penanganan Permasalahan telah melakukan penyamaan persepsi stakeholder di Wilayah Jawa Timur dan Jambi terkait Kasus yang terjadi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut melibatkan Kejaksaan, Polri, Inspektorat, dan Pemberi Keterangan Ahli PBJ.</p>  |

## **NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : 1 TAHUN 2023

Nomor : 129/SK/BP/ICW/V/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

### **SARAH SADIQA**

#### **Pt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**dan**

### **AGUS SUNARYANTO**

#### **KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**

**berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

1. Pengembangan kajian-kajian bersama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi kegiatan dan kampanye bersama melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk masyarakat sipil, Aparatur Sipil Negara, dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Peningkatan partisipasi publik dalam memantau dan melaporkan penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
8. Pengembangan bersama sistem-sistem elektronik untuk pengelolaan dan pemantauan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Implementasi Standar Layanan Informasi Publik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

10. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 – 05 – 2023).

**LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
a.n. KEPALA,  
Pit. SEKRETARIS UTAMA,**

**INDONESIA CORRUPTION WATCH  
KOORDINATOR BADAN PEKERJA,**

ttd

ttd

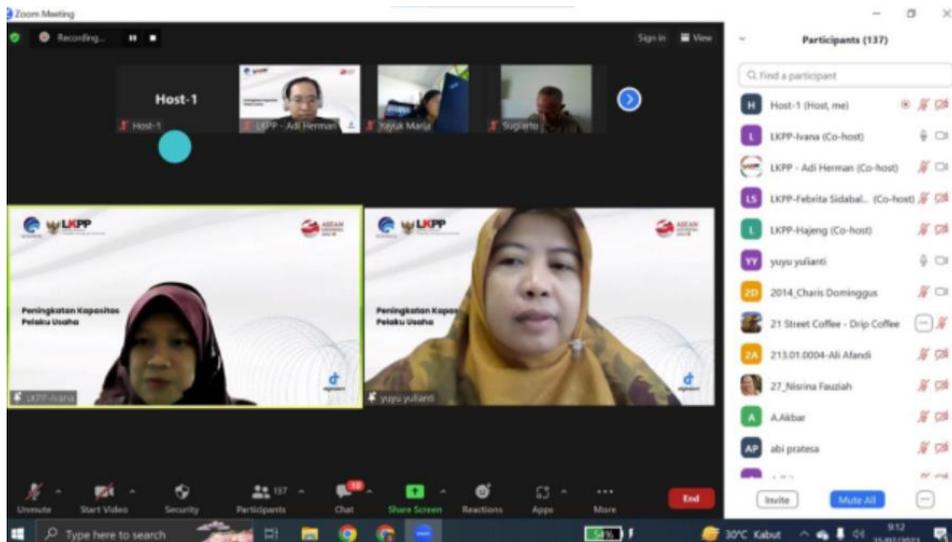
**SARAH SADIQA**

**AGUS SUNARYANTO**



## Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

### 1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Batch 5



### 2. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Batch 6



### 3. Forum Komunikasi Pelaku Usaha



#### 4. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha berkolaborasi dengan Kominfo Batch 1



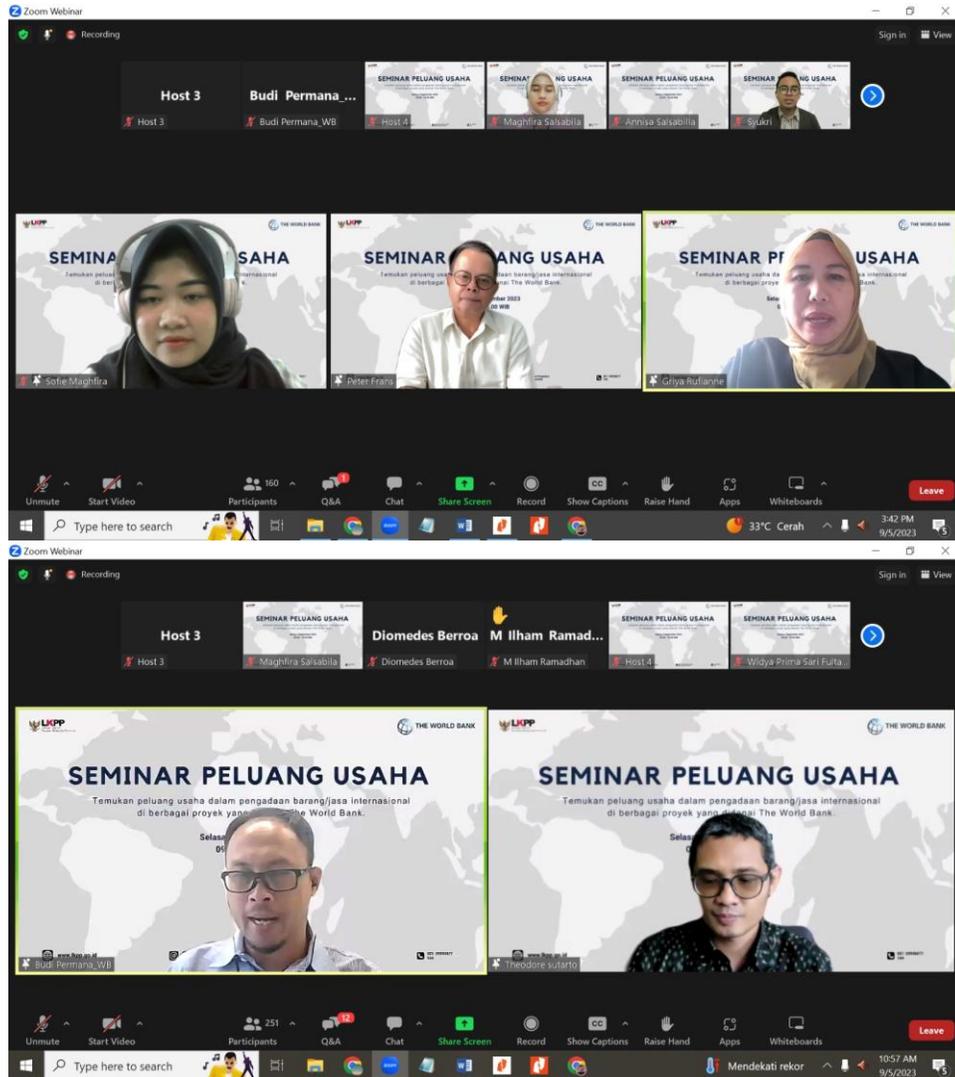
## 5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha berkolaborasi dengan Kominfo Batch 2



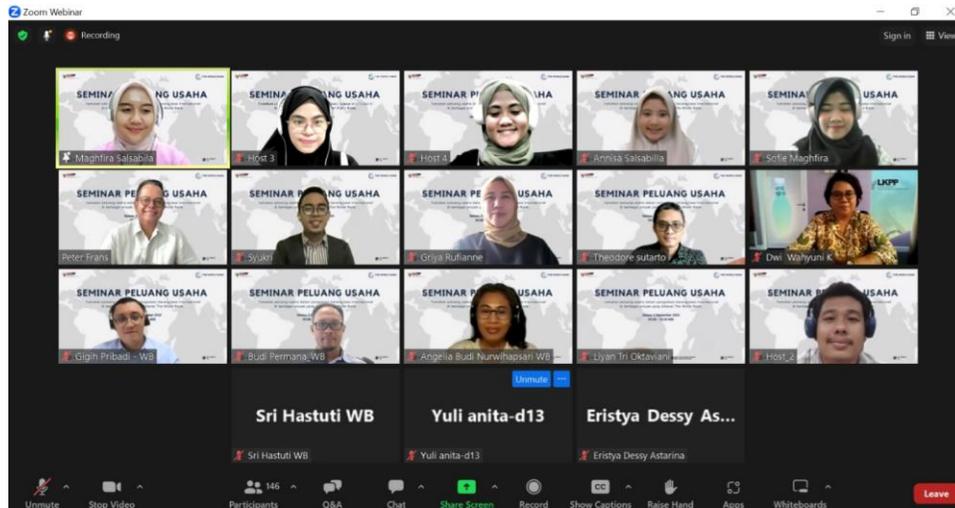
**6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha “Ibu Berdaya UMKM Berjaya ”**

## Dokumentasi Kegiatan Seminar Peluang Usaha

### 1. Kegiatan bersama World Bank



## 2. Kegiatan bersama IsDB



## DATABASE KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA DALAM PBJ

| NO           | PKP                         | TANGGAL          | JUMLAH PESERTA | AKUMULASI JUMLAH PESERTA | PROGRESS CAPAIAN |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 1            | Batch 1 (Sulsel)            | 16 Februari 2023 | 261            | 261                      | 21%              |
| 2            | Batch 2 (Malang)            | 9 Maret 2023     | 242            | 503                      | 41%              |
| 3            | Batch 3 (Pusdiklat Kominfo) | 11 April 23      | 37             | 540                      | 44%              |
| 4            | Batch 4 (Jakarta)           | 31 Mei 2023      | 268            | 808                      | 65%              |
| 5            | Polri                       | 6 Juli 2023      | 129            | 937                      | 76%              |
| 6            | Batch 5 Telkom              | 25 Juli 2023     | 129            | 1066                     | 86%              |
| 7            | Batch 6 Jatim               | 3 Agustus 2023   | 241            | 1307                     | 105%             |
| <b>TOTAL</b> |                             |                  | <b>1307</b>    |                          |                  |

### Penjelasan:

Pada tahun 2023, bersamaan dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan Forum Pelaku Usaha, **telah dilaksanakan pendampingan dalam pembuatan akun pada aplikasi SPSE agar dapat melakukan proses *on-boarding***. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan kegiatan dimaksud, telah dilakukan sosialisasi melalui kegiatan PKP sebanyak 6 *batch* kepada Pelaku Usaha dan K/L/PD sehingga Pelaku Usaha memperoleh pemahaman dan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun kegiatan (Rencana Aksi) ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dilaksanakan untuk **mendukung Sasaran Roadmap RB General “Meningkatnya Iklim Usaha dalam PBJ” melalui Sasaran Rencana Aksi “Meningkatnya Jumlah Pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam PBJP”**, dimana target pada tahun 2023 adalah 252 Pelaku Usaha (Akumulatif dari tahun 2020). Dalam hal ini UMKM dimaksud adalah yang **telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dan telah *on-board*** (terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik/SPSE LKPP) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

# DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA DALAM PBJ

## PKP Batch 1 Makassar



## PKP Batch 2 Kota Batu





PKP Batch 3



PKP Batch 4 di Jakarta



## PKP Batch 5

Zoom Meeting

Recording...

Host-1

Host-1

LKPP - Adi Herman

Yayuk Maria

Sugiarto

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

LKPP-Ivana

yuyu yulianti

Participants (137)

Find a participant

- Host-1 (Host, me)
- LKPP-Ivana (Co-host)
- LKPP - Adi Herman (Co-host)
- LKPP-Febrida Sidabalau (Co-host)
- LKPP-Hajeng (Co-host)
- yuyu yulianti
- 2014\_Charis Dominggus
- 21 Street Coffee - Drip Coffee
- 2A 213.01.0004-Ali Afandi
- 27\_Nisrina Fauziah
- A.Akbar
- abi pratesa

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Reactions Apps More End

Type here to search

54% 30°C Kabut 9:12 25/07/2023

## PKP Batch 6

Zoom Meeting

Recording...

PITER\_PT. GRIYA... CV LINTIKA MU...

PITER\_PT. GRIYA R... PITER\_PT. GRIYA RESIK MANDIRI +1 other raised hands X Dani Cristianing

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

BIRO PENGADAAN BAKAN/CIAGA

LPSE JATIM

yuyu yulianti

Setiawan Edi\_LPSE JATIM

Anwar Santoso

Participants (336)

anwa

- Anwar Santoso
- CA Choirul Anwar

2

Invite Mute All

Peningkatan Kapasitas Pelaku...

Izin tanya:  
Saya masih bingung utk bedanya sama peruntukannya ya..  
BISA Pengadaan  
BELA Pengadaan  
Tukadana

6 New Messages

Who can see your messages? Recording On

To: Untung Samodro - Kapey... (Direct Message)

Message Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Batch 6

Unmute Start Video Security Participants Share Screen Apps Whiteboards More End

Type here to search

72% 31°C 9:45 03/08/2023

# Polri

Recording... **LIVE** YouTube Sign in



## PELUANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

06 Juli 2023



Recording... **LIVE** YouTube Sign in

co-panitia

co-panitia Host\_Panitia PRIMKOPPOL-RESOR K... Randy - PT. Aneka Pro... ILHAM CV ILHAM JAYA... Muhamad daffa aqsha



Kamis, 6 Juli 2023  
Online Zoom Meeting

Pembina Sistha ws Rolog Polda DIY yuyu yulianti

Recording... **LIVE** YouTube Sign in



Participants: Pembina Sistha ws Rolog Pol, yuyu yulianti, LOGISTIK\_SARPRAS POLR..., Bagio.PP\_rsbtlungagung, Muhamad daffa aqsha, Dewi Suratmi, PRIMKOPPOL-RESOR KEP, Host\_Panitia, CV Lintas Tiga Karya, PT. Dekatama Centra Da..., Yhus ISO Waru, Del Arsy, Jagol Catering, Lydia, PT Kindara Arta Rasa, PT Budi Berlian Motor, sumarjono jono, Jeffrey, AEP NUGRAHA CV RAKA..., co-panitia, PT BERKAH RESTU ILLAHI, vivo Y21, Karin - PT. Systech Data L., PT Dwi Agung Makmur, MUSTIKA

| Tanggal Pelaksanaan | Kegiatan Sharing Knowledge   | Jumlah Badan Usaha | Pesentase capaian |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| 12-Apr-23           | Digital Prosperity Policy Enablers for Digital SMBs in Indonesia   | 28                 | 5,6%              |
| 27-Jun-23           | Seminar Peluang Usaha bersama United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Population Fund (UNFPA) | 163                | 38,2%             |
| 04-Jul-23           | Seminar on ADB Standard Bidding Document for Procurement of Works  | 19                 | 42,0%             |
| 17-Oct-23           | Seminar Peluang Usaha 2023 bersama Islamic Development Bank (IsDB)   | 119                | 65,8%             |
| 30-Oct-23           | International Expo by AKEN   | 59                 | 77,6%             |
| 05-Nov-23           | Seminar Peluang Usaha bersama The World Bank   | 125                | 102,6%            |
| 02-Nov-23           | Knowledge Sharing in Government Procurement Ecosystem in EFTA States   | 19                 | 106,4%            |
| <b>Jumlah</b>       |  | <b>532</b>         | <b>106,4%</b>     |

Justifikasi:

1. Data capaian Badan Usaha yang Difasilitasi dalam Peluang Akses PBJ Internasional menggunakan satuan "Badan Usaha". Capaian ini diperoleh melalui Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha merujuk pada fasilitasi dan pembinaan yang diberikan kepada suatu badan usaha selain BUMN, Koperasi, UMKM dan Industri, termasuk namun tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Firma, dan Persekutuan Perdata (Maatschap).
2. Dalam hal ini bentuk "Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha" adalah pelaksanaan kegiatan seperti sharing knowledge, workshop, Seminar Peluang Usaha (SPU), dan business matching dengan mitra pembangunan/organisasi internasional maupun dengan negara mitra.
3. Sejauh ini, nilai capaian yang diperoleh sebanyak 549 Badan Usaha melalui 6 (enam) kali kegiatan sharing knowledge dengan stakeholder dan pendampingan konsultasi bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek pengadaan internasional.
4. Dalam perhitungan ini, satu perusahaan bisa mendapatkan fasilitasi dan pembinaan di berbagai kesempatan. Hal tersebut semakin mencerminkan tingginya tingkat awarness pelaku usaha untuk mengetahui prosedur pengadaan dari berbagai mitra pembangunan/negara mitra/stakeholder.

Nomor : 31027/D.4.3/11/2023 07 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Timur**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jajaran Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Timur**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : CMw32V  
Nomor Tiket : SK202311070035



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : CMw32V  
**Nomor Tiket** : SK202311070035

Nomor : 31098/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Jawa Timur**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, dan perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Jajaran Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : DcnVzg  
Nomor Tiket : SK202311080001

Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Senggang LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : DcnVzg  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31096/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Jambi**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, dan perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kejaksaan Tinggi Jambi dan Jajaran Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi Jambi**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : jS4rfp  
Nomor Tiket : SK202311080001

Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : jS4rfp  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31088/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Jl. Raya Bandara Juanda No.38, Semawalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : TUiKUn  
Nomor Tiket : SK202311080001

Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : TUiKUn  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31137/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 11:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 9ZfbQI

Nomor Tiket : SK202311080017

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengguh LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : 9ZfbQI  
**Nomor Tiket** : SK202311080017

Nomor : 31135/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **1. Mediator/Konsiliator LPS Kontrak PBJP**  
**2. Arbiter LPS Kontrak PBJP**  
**3. Advisor PBJP**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang Sudara/i untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Bersama ini kami lampirkan Susunan Acara Kegiatan dan kami memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi Konfirmasi Kehadiran melalui tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Rieska Ayu pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : kbDM2v  
Nomor Tiket : SK202311080015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : kbDM2v  
**Nomor Tiket** : SK202311080015

Nomor : 31216/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 ([persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id))

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, *Advisor*, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi. Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Mahkamah Agung Republik Indonesia**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan Susunan Acara Kegiatan dan kami memohon kesediaan untuk mengisi Konfirmasi Kehadiran yang dapat dibantu oleh Sekretaris/Staf Bapak/Ibu melalui tautan <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Rieska Ayu pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : ev1aPg  
Nomor Tiket : SK202311080032

Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : ev1aPg

**Nomor Tiket** : SK202311080032

Nomor : 31027/D.4.3/11/2023 07 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Timur**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jajaran Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Timur**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : CMw32V  
Nomor Tiket : SK202311070035



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Senggang LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : CMw32V  
**Nomor Tiket** : SK202311070035

Nomor : 31028/D.4.3/11/2023 07 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan Kepolisian Resor di Provinsi Jambi**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kepolisian Daerah Jambi dan Jajaran Kepolisian Resor di Provinsi Jambi**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : v1AGw7  
Nomor Tiket : SK202311070036



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : v1AGw7  
**Nomor Tiket** : SK202311070036

Nomor : 31095/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur**  
Jl. Raya Ir. H.Juanda, Semawalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254 ([humas.jatim@bpk.go.id](mailto:humas.jatim@bpk.go.id))

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Qx64t8  
Nomor Tiket : SK202311080001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : Qx64t8  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31093/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi**  
Jl. Pangeran Hidayat Km. 6,5 No.65, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Suka Karya,  
Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129 ([humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id))

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : bPtw7  
Nomor Tiket : SK202311080001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : bPtw7  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31086/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi**

Jl. HOS. Cokroaminoto No.107, Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : LOr4Ui  
Nomor Tiket : SK202311080001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : LOr4Ui  
**Nomor Tiket** : SK202311080001

Nomor : 31138/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : urN8Gb  
Nomor Tiket : SK202311080018



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : urN8Gb  
**Nomor Tiket** : SK202311080018

Nomor : 31142/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur**  
Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jawa Timur 60174

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : rdGbi9

Nomor Tiket : SK202311080022

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : rdGbi9  
**Nomor Tiket** : SK202311080022

Nomor : 31141/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi**  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telanai Pura Jambi 36128

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : UDKSIE  
Nomor Tiket : SK202311080021

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengguh LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : UDKSIE  
**Nomor Tiket** : SK202311080021

Nomor : 31139/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**  
di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : Jxyhu  
**Nomor Tiket** : SK202311080019



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : Jxyhu  
**Nomor Tiket** : SK202311080019

Nomor : 31140/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**  
di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi** untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dengan mengisi tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan pula Susunan Agenda Kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Riri pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : gHnQqO  
Nomor Tiket : SK202311080020



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Senggang LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : gHnQqO  
**Nomor Tiket** : SK202311080020

Nomor : 31136/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Pemberi Keterangan Ahli (PKA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)**  
Di Tempat

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, Advisor, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi.

Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang Saudara/i untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Bersama ini kami lampirkan Susunan Acara Kegiatan dan kami memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi Konfirmasi Kehadiran melalui tautan: <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Rieska Ayu pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : WSx0cf  
Nomor Tiket : SK202311080016

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : WSx0cf  
**Nomor Tiket** : SK202311080016

Nomor : 31215/D.4.3/11/2023 08 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan sebagai Peserta dalam Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi

Yth. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia**

Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
([humas.puspenkum@kejaksaan.go.id](mailto:humas.puspenkum@kejaksaan.go.id))

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang merupakan salah satu susunan organisasi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas dalam melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam memberikan layanan pendapat hukum dan keterangan ahli terkait penyimpangan, rekayasa, dan/atau tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan kesamaan pemahaman substansi bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara baik antara LKPP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Auditor, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Arbiter, Konsiliator, Mediator, *Advisor*, perwakilan Inspektorat Pemerintah Daerah, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur dan Jambi. Sehubungan hal di atas, kami bermaksud mengundang **Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam **Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi** yang akan diselenggarakan secara daring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting*  
Link Rapat : <https://s.id/PenyamaanPersepsiJatimJambi>  
ID Rapat: 823 3179 1267  
Kode Sandi: 600451

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang berwenang sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Bersama ini kami lampirkan Susunan Acara Kegiatan dan kami memohon kesediaan untuk mengisi Konfirmasi Kehadiran yang dapat dibantu oleh Sekretaris/Staf Bapak/Ibu melalui tautan <https://s.id/KonfirmasiKehadiranPenyamaanPersepsi>. Perlu kami informasikan bahwa kami tidak membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Bilamana terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dalam kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Rieska Ayu pada nomor handphone (085601944051).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Awlpu7  
Nomor Tiket : SK202311080031

Hukum,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Raden Ari Widiyanto

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : Awlpu7  
**Nomor Tiket** : SK202311080031





| Timestamp           | Nama (Tanpa Gelar)       | Jabatan                      | Instansi                  | Email                      | Bagaimana kesan Bapak/Ibu terkait pelaksanaan Kegiatan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan Jambi?   | Apakah terdapat saran/masukan untuk kegiatan Penyamaan Persepsi yang akan datang?  |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|
| 28/11/2023 08:47:23 | Eko Kuswoyo              | Auditor Madya                | Inspektorat Kabupaten B   | satrio.unr@gmail.com       | Referensi baik untuk peningkatan pemahaman bagi pejabat atau pegawai tentang kebijakan terbaru dan pelaksanaan tugas penanganan pengaduan yang berimplikasi masalah hukum   | Perlu dilaksanakan secara rutin guna mengikuti perkembangan kebijakan dan penanganan pengaduan yang berimplikasi masalah hukum   |
| 28/11/2023 08:47:36 | Andi Aprizon             | Pengelola Pengadaan Ba       | Pemkot Kota Jambi         | andiaprizon80@gmail.com    | Sangat bermanfaat bagi pelaku pengadaan   | Mengundang APH agar sama pemahaman   |
| 28/11/2023 08:48:28 | CEPY INDRANUNAWAN        | KASUBSI PENUNTUTAN           | KEJAKSAAN NEGERI M        | cepyindragunawan@gmail.com | masih belum ada persamaan persepsi dalam penanganannya  | agar secara rutin diadakan FGD   |
| 28/11/2023 08:48:55 | BUDI ISMANTO             | AUDITOR PERTAMA              | INSPEKTORAT BOJONE        | ombondq@gmail.com          | sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah   | sering dilaksanakan acara seperti ini  |
| 28/11/2023 08:49:11 | H. SIRAIT                | PS. PANIT 1 UNIT 2 SUB       | POLDA JAMBI               | sirait09@gmail.com         | Sangat bermanfaat dan perlu dilaksanakan secara berkala guna mengupgrade ilmu ttg PBJ   | Perlu dilakukan secara offline (pertemuan tatap muka) agar kegiatan penyamaan persepsinya lebih efektif  |
| 28/11/2023 08:49:39 | Sudiharto                | Kepala UPT PSDA Grati        | Dinas SDA, Cipta Karya d  | dadangsukirno@gmail.co     | Sangat bermanfaat   | -  |
| 28/11/2023 08:50:02 | lutfi niki saputra       | Auditor Muda                 | Inspektorat Daerah Bung   | Luffriki9@gmail.com        | mantap  | tidak  |
| 28/11/2023 08:51:10 | Irena Musdalifah Perdani | Auditor Terampil             | Inspektorat Daerah Kabu   | irena.musdalifah@gmail.c   | baik, kegiatan seperti ini sangat membantu untuk kegiatan dan kasus yang sering ditemui di pekerjaan  | sudah baik   |
| 28/11/2023 08:51:30 | Mustafa Kamal            | Auditor                      | Inspektorat Kab. Mojokert | kamal.lampoenk@gmail.c     | sangat bermanfaat spy seragam dilip2 daerah   | utk seluruh daerah2 di Indonesia   |
| 28/11/2023 08:51:31 | IMAM WAHYUDI             | Auditor Muda                 | INSPEKTORAT DAERAH        | imam.wahyudi7680@gmail.c   | Sangat baik guna menyamakan persepsi atas pengadaan barang jasa   | Penyamaan persepsi baiknya terus dan selalu diadakan terutama saat ada perubahan atas ketentuan baru dalam pengadaan barang jasa.  |
| 28/11/2023 08:52:00 | TARTILAH RESTU HIDAY     | JAKSA FUNGSIONAL KE          | KEJAKSAAN RI              | pidsuskejarj.ponorogo@g    | Sangat bermanfaat untuk para APH  | Agar diadakan secara rutin kegiatan seperti ini  |
| 28/11/2023 08:52:06 | Henry                    | PPK                          | Politeknik Negeri Padang  | hen_yanz@yahoo.co.id       | -   | -  |
| 28/11/2023 08:52:33 | SUDIRMAN, S.H., M.H.     | KANIT II SAT RESKRIM F       | POLRI                     | dirman.b4e@gmail.com       | Sangat bagus  | Trima kasih  |
| 28/11/2023 08:52:36 | Frans Billy Nadapdap     | Kanit Tipikor Polres Merai   | Poiri                     | fransbilly16@gmail.com     | Sangat baik dan sangat membantu   | Saya rasa cukup. Kegiatan tersebut sudah baik  |
| 28/11/2023 08:52:56 | Fitri Yusman             | PKA, Fasilitator, Asesor     | IAPI                      | ipepfly@yahoo.com          | sangat baik, memberikan informasi yg bagus  | kegiatan penyamaan persepsi seperti ini sebaiknya sering dilakukan terutama dgn narsum pak deputi  |
| 28/11/2023 08:53:08 | BAMBANG TRI SUTRISH      | KASAT RESKRIM                | POLRES MOJOKERTO K        | Ssatrekskrimpoiresmojoke   | sangat baik dan bermanfaat  | dilaksanakan secara periodik   |
| 28/11/2023 08:54:41 | DUDY SRIYONO             | KANIT TIPIKOR                | POLRES KERINCI - POLI     | dudy_sriyono@yahoo.co      | Bermanfaat untuk menambah pengetahuan   | diadakan tatap muka  |
| 28/11/2023 08:55:21 | ROSDIANA                 | Fungsional Pengelola Per     | Badan Pelayanan Penga     | odipj2010@gmail.com        | Sangat bermanfaat untuk peningkatan imun selaku PBJ   | Agar APJP juga jangan semudah menuduh pelaku PBJ sebagai yang disalahkan.  |
| 28/11/2023 08:55:41 | AGUS KURNIAWAN           | KEPALA SEKSI TINDAK I        | KEJAKSAAN RI              | pidsuskejarj.ponorogo@g    | Sangat bermanfaat untuk para APH  | Agar selalu rutin dilakukan kegiatan seperti ini   |
| 28/11/2023 08:56:24 | Ineke Ayu Prianandhini   | Auditor                      | Inspektorat Daerah Kabu   | ayuprianandhini@gmail.c    | Jelas   | -  |
| 28/11/2023 08:56:40 | SYAFRUDDIN, SE           | Kepala Bidang Kemetrolo      | Dinas Perdagangan Dan     | syafrudinsiregar333@gm     | Sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi dalam menangani kasus   | Kedepan untuk kasus yang sering terjadi untuk disampaikan  |
| 28/11/2023 08:56:48 | Budi Setyono             | Pemberi Keterangan Ahli      | BNPP-RI                   | setyonobudi.1980@gmail     | nambah pengetahuan dan isu terkini  | agar rutin diselenggarakan untuk sama frekuensi  |
| 28/11/2023 08:57:01 | Kumiawan Ilyas           | Kabag Hukum Pemkot Ke        | Pemerintah Kota Kendari   | ccms17202020@gmail.c       | Baik  | Terus Lakukan Pendampingan kepada APH  |
| 28/11/2023 08:57:39 | Rachma Hasnita           | Auditor Muda                 | Inspektorat Daerah Kabu   | pradanarachma@yahoo.c      | sudah baik  | tidak ada  |
| 28/11/2023 08:57:50 | Irwan Iskandar           | JF PPBJ                      | Sekretariat Pemprov. Kalt | irwaniskandar100703@gr     | Bermanfaat  | Agar permasalahan pbj jangan diarahkan ke tipikor  |
| 28/11/2023 08:58:39 | Edward Henry             | Direktur                     | Unpad                     | edward.henry@unpad.ac      | Kegiatan spt ini sangat diperlukan utk meng update pengetahuan para pelaku pengadaan  | Saya pikir sdh cukup baik  |
| 28/11/2023 08:58:43 | Dimas Sakti Pamungkas    | Fungsional Pengelola Per     | Kabupaten Gresik          | sakti.dimas@yahoo.com      | bagus sekali  | sudah baik   |
| 28/11/2023 08:59:04 | Muhammad Zainuddin       | Perencana Pertama            | LKPP                      | muhammad.zainuddin@lk      | -   | seiring maraknya OTT, alangkah baiknya kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin dan berkala terima kasih  |
| 28/11/2023 08:59:51 | FADHLIL KHALIQ IRAWA     | PENGELOLA PBJ AHLI N         | PEMPROV KALTIM            | fadhli.engineering@gmail   | Sangat perlu dilaksanakan dalam skala yang lebih luas lagi secara nasional  | Kegiatan seperti ini sangat bagus sekali dirutinkan, namun mohon dikoordinasikan internal LKPP karena seringkali bersamaan dengan kegiatan COP ataupun kegiatan sosialisasi bimtek pelatihan dari bidang/deputi LKPP yang lain   |
| 28/11/2023 08:59:56 | Raymon Budi Hermanto     |                              | Pemprov DKI Jakarta       | ray_basten@yahoo.co.id     | Sangat bermanfaat   | Lebih banyak diskusikan terkait implementasi dan penanganan antara pelaku pengadaan dan APH  |
| 28/11/2023 09:01:02 | Achmad Mujtaba           | Advisor                      | Kementerian Keuangan      | uta.jfpp@gmail.com         | Sangat bermanfaat   | Perbanyak kegiatan serupa dengan mengangkat tema isu/kasus kontemporer   |
| 28/11/2023 09:03:49 | Riwandi Barus, Sh        | Ps. Kanit III Tipidkor Polre | Polres Sarolangun         | riwandi-barus26@gmail.c    | Kegiatan ini sangat membantu & bagus.   | Bim ada  |
| 28/11/2023 09:05:04 | Jalpahdy                 | Kanit Tipidkor Polres Bun    | Polres Bungo Polda Jamt   | jalpa83azy@gmail.com       | Zoommeeting   | Mantap   |
| 28/11/2023 09:06:16 | AGUNG BUDI SUSETIO       | Kepala Seksi Tindak Pida     | Kejaksaan Negeri Kota M   | scooterspeed20@gmail.c     | Menambah Wawasan dan Keilmuan   | Semoga masih banyak lagi kegiatan seperti ini  |
| 28/11/2023 09:06:39 | Iis Jama' Ahmadi         | PPUPD Muda                   | Inspektorat Daerah Provir | iisahmadi87@gmail.com      | Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.   | -  |
| 28/11/2023 09:07:12 | Edi Saputra P            | Pengelola PBJ Pertama        | PUSLATBANG KMP LAN        | edhi_wajo@yahoo.com        | Soundnya agak kecil. Trus sy beberapa kali mengikuti kegiatan LKPP di mana pak Setya sebagai narasumber, sy melihat, pak Setya lebih banyak selalu menyalakan pelaku PBJ. Apalagi di depan APH, ini justru menjadi legitimasi mereka untuk menekan kita. Mohon maaf skali yah, saya cuma memberi kesan. Mohon maaf kalo salah atau menyinggung perasaan | Saran saya, mohon LKPP juga keras dan intens menyuarakan kesalahan administrasi dan pidana itu beda. Yang mana Administrasi, yang mana Pidana. Mohon beri penekanan tentang mens rea nya. Mohon maaf skali yah, saya cuma memberi saran. Mohon maaf kalo salah atau menyinggung perasaan |
| 28/11/2023 09:09:29 | Koko prasetyo            | Anggota                      | Polres Gresik             | Prasetyokoko011@gmail      | Bagus sekali  | Di laksanakan setiap 6 bulan sekali  |
| 28/11/2023 09:09:48 | Achfas Zacoeb            | Advisor                      | Universitas Brawijaya     | zacoeb@gmail.com           | Sangat Bermanfaat   | Lanjutkan  |
| 28/11/2023 09:10:11 | D. ROCHMAN               | JAKSA FUNGSIONAL BII         | KEJAKSAAN TINGGI JAW      | decyimas@gmail.com         | Bagus   | Sebaiknya diadakan per tri wulan (3 bulan) sekali, sehingga penanganan atas pelaksanaan PBJ benar-benar satu persepsi dari APH maupun APJP dan tidak selalu masuk dalam ranah pidana/pidana khusus. Trims...   |
| 28/11/2023 09:13:10 | YOYOY SUROYO EAS         | KANIT III PIDKOR SATRE       | POLRES MADIUN             | satrekskrimadiun@gmail     | kami dari APH berterimasi atas kegiatan ini bisa menambah ilmu pengetahuan baru tentang pengadaan barang dan jasa   | sudah baik   |
| 28/11/2023 09:13:27 | Mokhmad Kholid           | Inspektur Pembantu II Ins    | Pemerintah Kabupaten Pr   | kholid234@gmail.com        | Sangat bagus dan memberikan pencerahan bagi kami  | Kegiatan seperti iniperlu dilakukan rutin secara berkala   |
| 28/11/2023 09:15:00 | Ega Cipta Septian        | Auditor                      | Inspektorat Kabupaten Tu  | ega.cipta@gmail.com        | adverse   | penegakan hukum yang baik, akan berdampak baiknya pada tatanan yang ada, selama tidak ada pelanggaran hukum yang baik, apapun kiat-kiat yang dilakukan akan sia sia  |
| 28/11/2023 09:16:26 | Arthur Halik Razak       | Dosen Lektor Kepala          | Politeknik Negeri Ujung P | halik_razak_arthur@yaho    | Kegiatan bermanfaat   | Kegiatan rutin setiap bulan  |
| 28/11/2023 09:19:33 | Suyadi                   | Ahli Pertama JF PPBJ         | Pemerintah Kabupaten Ri   | suyadi793@gmail.com        | Tema Diskusi yang sangat baik   | ada  |
| 28/11/2023 09:19:54 | Suyadi                   | Ahli Pertama JF PPBJ         | Pemerintah Kabupaten Ri   | suyadi793@gmail.com        | Tema Diskusi yang sangat baik   | Diadakan dengan materi hukum yang lain   |





**NOTULENSI RAPAT**  
**Penyamaan Persepsi dalam Rangka Penanganan Permasalahan Hukum**  
**di Wilayah Jawa Timur dan Jambi**

**Hari/Tanggal** : Selasa, 28 November 2023  
**Media** : *Video Conference* melalui *Zoom Meeting*  
**Pukul** : 08.00 - 11.00 WIB  
**Agenda** : **Penyamaan Persepsi dalam Rangka Penanganan Permasalahan Hukum di Wilayah Jawa Timur dan Jambi**

---

**PEMBUKAAN :**

Kegiatan dibuka oleh Raden Ari Widiyanto (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum). Tujuan rapat ini adalah

1. Untuk menjadi sarana diskusi bagi peserta terkait penanganan permasalahan PBJ

**Setya Budi Arijanta - Deputi Bidang Hukum & Penyelesaian Sengketa**

1. Pengadaan barang/jasa masih menduduki peringkat dalam tindak pidana korupsi yang didasarkan pada data KPK
2. Salah satu kasus memprihatinkan adalah kasus BTS
3. Selain itu, banyak juga sengketa kontrak dalam pengadaan barang/jasa. Padahal apabila dalam proyek-proyek strategis pemerintah tidak boleh terhambat. Dari laporan yang masuk ke LKPP, banyak proyek yang mangkrak. Untuk itu, menjadi penting untuk mencegah pelanggaran hukum dalam PBJ
4. Aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari
  - a. Wilayah Hukum Administrasi  
Pada tahap perencanaan, persiapan, pemilihan (pada saat pengumuman sampai dengan sanggah)
  - b. Wilayah Hukum Perdata  
Pada tahap SPPBJ, kontrak, serah terima, dan keadaan kahar
  - c. Wilayah hukum pidana, yakni apabila terjadi suap, mark up, fiktif, korupsi
  - d. Wilayah hukum persaingan usaha, jika terjadi persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan
5. Ombudsman juga menerima pengaduan di bidang PBJ terkait maladministrasi
6. Terdapat skema negara untuk meningkatkan penggunaan barang/produk dalam negeri
7. WTP adalah kewajiban, bukan prestasi. Pengadaan juga seharusnya mendorong dan menyelamatkan perekonomian negara.
8. Terdapat perintah wajib apabila kebutuhan KLPD sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri maka tidak boleh belanja import.
9. Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022, setiap KLPD diperintahkan untuk belanja PDN minimal 40%
10. Usaha Kecil dan Mikro bukan hanya berasal dari jenis usaha kuliner, fashion dan kerajinan. Namun, UMKM juga berasal dari jenis usaha pariwisata, konstruksi, dan lainnya
11. Dari total belanja, minimal belanja PDN adalah sebesar 95 % dan akan diaudit secara berkala setiap 3 bulan sekali oleh BPKP
12. Tahun 2022 lalu, dianggarkan belanja PDN mencapai 500T

13. Banyak yang enggan belanja PDN dengan alasan kualitas yang tidak terlalu baik dan harganya yang mahal. Perintah Undang-Undang jelas menyebutkan bahwa harga tidak menjadi indikator pembandingan.
14. Terdapat pemahaman yang keliru terkait banyak proyek yang tidak selesai atau mangkrak. Terdapat pemahaman yang keliru dimana tender harus dimenangkan dari yang terendah. Padahal, undang-undang sama sekali tidak memerintahkan terkait hal tersebut.
15. Jika ada pengaduan dimana dengan tender kemudian penawar terendah tidak menang maka jangan langsung diduga sebagai tindak pidana korupsi.
16. Jika peserta tidak memenuhi syarat teknis dan kualifikasi maka layak untuk digugurkan
17. Ada pemahaman yang keliru dimana jika di atas 200 juta harus tender. Terdapat mekanisme lain, yakni dengan penunjukan langsung dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan penanganan darurat yang tidak bisa ditunda.
18. Pada pengadaan khusus tidak diperlukan penyusunan HPS dan Pokja Pemilihan. Tidak perlu ada negosiasi.
19. Perlu dilihat oleh APH apakah suatu proyek tersebut masuk renstra, kemudian apakah ada analisis kebutuhannya.
20. APH perlu melihat terlebih dahulu dari proses perencanaan karena selama ini hanya berfokus pada kesalahan PPK dan Pokja Pemilihan
21. APH dan auditor jika dimintai *advice* maka perlu dikomunikasikan dengan Ahli teknis.
22. Pemberian kesempatan tidak boleh direncanakan sebelumnya
23. Bentuk penyimpangan pada Proses Perencanaan
  - a. Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematis
  - b. Kurang tepat dalam menentukan cara pengadaan
  - c. Intervensi negatif dalam penganggaran pengadaan
  - d. Penganggaran pengadaan tanpa perhitungan kebutuhan yang tepat atau kebutuhan biaya pengadaan tidak komprehensif
  - e. Tindakan pemecahan paket menghindari tender
  - f. Perhitungan kuantitas dan waktu proses pengadaan yang tidak cermat
  - g. Pengangkatan pelaku pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan tidak tepat waktu
  - h. Tidak mempersiapkan kebutuhan kerja aparatur pelaku pengadaan
  - i. Adanya intervensi vendor sejak perencanaan
  - j. Risalah pembahasan perencanaan pengadaan tidak terdokumentasikan
  - k. Pihak yang menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan tidak memahami dan tidak mempelajari dokumen yang ditetapkan
  - l. Tidak mengumumkan RUP atau pemilihan penyedia dilakukan sebelum pengumuman RUP
24. Bentuk penyimpangan pada Persiapan Pengadaan
  - a. Spesifikasi teknis / KAK tidak disusun sejak perencanaan
  - b. Penetapan spesifikasi teknis / KAK tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan
  - c. Spesifikasi teknis / KAK diskriminatif;
  - d. Spesifikasi teknis / KAK sudah melibatkan vendor yang akan melaksanakan;
  - e. Spesifikasi teknis / KAK menyalin sama persis dengan produk atau merk tertentu

- f. Pemahaman kurang akan spesifikasi teknis / KAK
  - g. Spesifikasi teknis / KAK yang dibuat tidak didasari identifikasi ketersediaan pasar dan pelaku usaha
  - h. Spesifikasi teknis / KAK yang ditetapkan tidak dapat diukur dengan jelas capaiannya
25. Bentuk penyimpangan pada Persiapan Pemilihan
- a. Kurangnya analisa pasar
  - b. Pemilihan metode pemilihan yang kurang tepat
  - c. Penambahan persyaratan yang tidak perlu/mengada-ada
  - d. Evaluasi penawaran tanpa justifikasi teknis
  - e. Penjadwalan yang dapat merugikan pihak tertentu
  - f. Persekongkolan (Vertikal/Horizontal)
  - g. Proses tidak terdokumentasikan
  - h. Pemalsuan dokumen
  - i. Kendali pihak yang tidak bertanggungjawab dan Intervensi jahat
  - j. Klarifikasi dan pembuktian yang tidak optimal
  - k. Pinjam perusahaan
26. Bentuk penyimpangan pada Pelaksanaan Kontrak
- a. Adanya pungutan, seperti alasan penjilidan atau biaya lainnya
  - b. Kontrak yang ditandatangani tidak reliabel
  - c. Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak
  - d. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak
  - e. Tandatangani kontrak tanpa pertemuan
  - f. Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan
  - g. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak
  - h. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
  - i. Lemahnya pengendalian kontrak
  - j. Tidak dilakukan pemeriksaan hal-hal yang disampaikan dalam penawaran pada saat kontrak
  - k. Konsultan menggunakan tenaga ahli fiktif
  - l. Tenaga ahli dalam kontrak tidak pernah diperiksa
  - m. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak
  - n. Tahapan kontrak tidak dilaksanakan
  - o. Pemalsuan laporan data pekerjaan

## **DISKUSI**

### **1. Q: Kurniawan (Advisor LKPP)**

Kami mendorong LKPP untuk menetapkan RUU PBJ. Diharapkan, tidak terdapat banyak kasus yang masuk ranah pidana. Misalnya dalam hal adanya penipuan data, kerugian negara, maka dapat diselesaikan melalui ranah perdata (penyelesaian administrasi). Kemudian, terkait perbedaan harga dari setiap penyedia di katalog lokal yang cukup signifikan, perlu didalami lebih lanjut

### **A: Setya Budi A (LKPP)**

Terkait dugaan adanya persekongkolan peserta tender, harapannya dapat segera dilaporkan ke KPPU. Indikasi-indikasi adanya persekongkolan perlu diketahui oleh para APH. Yang menjadi persoalan saat ini adalah seringkali setiap dugaan tersebut dibiarkan. Terkait tindak pidana dalam PBJ, setiap adanya dugaan suap dan

gratifikasi, maka dapat diproses secara pidana. Akan tetapi, apabila permasalahan terletak pada ranah administrasi dan masih belum FHO, maka harapannya dapat diproses oleh APIP. Kemudian terkait dengan katalog elektronik, setiap PPK harus melakukan negosiasi kepada penyedia yang memiliki harga terendah terlebih dahulu. Ketika yang dipilih adalah bukan yang terendah, maka patut dicurigai bahwa terdapat proses suap menyuap, seperti kasus OTT di Kabupaten Meranti dan Kota Bandung.

**2. Q: Sanuri**

PPK/Pokja dalam Dokumen Pemilihan pekerjaan aspal menambahkan syarat “Jarak AMP maksimal 80 km dari lokasi pekerjaan” dengan alasan agar pada saat hotmix dihampar masih memenuhi suhu minimum. Apakah hal ini termasuk penambahan syarat yang bersifat diskriminatif dan dilarang?

**A: Setya (LKPP)**

Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh ahli teknis apakah syarat tersebut memang sesuai atau hanya berupa penambahan syarat yang bertujuan untuk membatasi kompetisi

**3. Q: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh**

Apakah dokumen kualifikasi teknis perlu dilakukan pengecekan atau klarifikasi oleh Pokja Pemilihan?

**A: Setya Budi A (LKPP)**

Apabila Pokja ada keraguan terkait dokumen maka wajib untuk klarifikasi. Misalnya, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pihak penerbit dokumen untuk membuktikan keaslian dari dokumen yang disampaikan oleh peserta tender. Kemudian, saat ini klarifikasi dapat dilakukan juga by system. Selain itu, peserta tender juga diharapkan dapat membuat surat pernyataan akan keaslian dokumen yang disampaikan.

**4. Q: Polda Jambi**

Sedang melakukan proses penyelidikan dan menemukan adanya penyimpangan. Dalam proses tender atau lelang ditemukan bahwa tim Pokja Pemilihan melakukan addendum dokumen pengadaan, salah satunya adalah merubah jumlah jaminan penawaran. Addendum tersebut dilaksanakan pada Jum'at sementara waktu penawaran adalah Senin. Dengan keterbatasan waktu tersebut maka menjadikan beberapa peserta tidak bisa mengajukan penawaran. Kemudian ditemukan satu pemilih yang sudah mengetahui addendum tersebut jauh-jauh hari sehingga dapat memasukan penawaran. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

Kemudian yang kedua adalah terkait disiplin ilmu ..... yang tidak sesuai.

**A: Setya Budi A (LKPP)**

APH perlu memperdalam lagi terkait jaminan penawaran yang dikoreksi. Ketika terdapat indikasi perbedaan perlakuan kepada salah satu peserta, maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian, apabila terdapat addendum dalam dokumen pemilihan, maka seharusnya perlu dilakukan aanwijzing ulang. Masukan dari kami adalah dapat diusulkan untuk permohonan layanan pemberian keterangan ahli kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya.

**5. Q: Karsono (PKA)**

Seringkali, pada saat sidang kami diberikan pertanyaan oleh majelis hakim bahwa saya selaku PKA bukan merupakan pegawai LKPP. Selain itu, perlu dijelaskan terkait dengan IP address pada LPSE

**A: Setya Budi A(LKPP)**

Kami sudah menyiapkan SK bagi para PKA LKPP diluar ST yang saat ini sudah disediakan. Terkait IP address, saat ini sudah disediakan akses untuk masuk ke LPSE oleh para APH dan auditor. Selain itu, apabila terdapat kendala teknis di sistem, dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke LKPP.

**6. Q: Hendra**

Untuk pengadaan meubelair/furniture dengan pagu anggaran diatas 4 miliar dengan kurang lebih 30 jenis item barang, apakah boleh dengan menggunakan e-purchasing? dalam pelaksanaannya sudah terdapat perikatan dengan penyedia.

**A: Setya Budi A(LKPP)**

Selama sudah tayang di e-katalog, maka didorong untuk melakukan e-purchasing pada e-katalog.

**7. Q: Ronald**

Terdapat kasus pekerjaan konstruksi belum selesai, masa kontrak sudah habis, pekerjaan belum selesai dan belum FHO tetapi sudah dibayar 100%. Terdapat pihak yang keberatan dengan masuknya APH dengan alasan belum ada FHO

**8. Q: Kay**

Mohon dijelaskan terkait pengadaan jasa EO acara kesenian, apakah memang betul menggunakan metode pengadaan pengecualian? Prosesnya apakah memang penunjukan langsung?

**A: Setya Budi A(LKPP)**

Pengadaan jasa EO bukan merupakan pengadaan yang dikecualikan, sehingga selain dapat dilakukan penunjukan langsung juga dapat dilakukan e-purchasing

**9. Q: Yudho**

Untuk pengadaan melalui E-Katalog apakah dibolehkan sebelum melakukan penawaran secara online, melakukan penawaran dan kesepakatan terlebih dahulu secara offline melalui WA/Telpon sehingga penawaran secara online di E-Katalog tersebut hanya untuk melegal formalkan proses saja

**A: Setya**

Hal tersebut tidak diperbolehkan.

**10. Q: Muhyuni**

Terkait mekanisme nego paket e katalog sebagai contoh pengadaan pupuk dimana nilai e-katalog lebih mahal dibanding yang terjual di toko online. Penyedia adalah sama untuk 3 tahun berturut-turut, kemudian nego yang dilakukan hanya sebatas biaya pengiriman. Nego tersebut seharusnya bisa lebih besar karena harga di toko online lebih murah. Apakah hal ini bisa masuk sebagai bentuk kesengajaan, ketika nego harga tetap lebih mahal dari toko online apakah bisa digunakan sebagai dasar instansi melakukan lelang?

**A: Setya Budi A (LKPP)**

Apabila diketahui harga diluar katalog lebih murah dengan spesifikasi yang sama, maka produk tersebut dapat diturun tayangkan.

Demikianlah notulensi rapat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.  
Mengetahui,



Dara Kumala A

Notulis



Rizka